



**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

PENYUSUNAN PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIK KELEMBAGAAN (PSETK)

INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM



Disampaikan Oleh :
Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Disampaikan Pada Acara:
**Pelatihan Verifikasi DLI untuk BPKP
Bandung , 20 – 22 September 2018**



PSETK ?

Gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) untuk perencanaan program pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A , Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif.





Landasan Hukum

Beberapa Peraturan yang mengatur PPSI yang terkait dengan pelaksanaan PSETK:

- UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan,
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN,
- Permentan No. 19/Permentan/H.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019,
- Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang PPSI
- PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran



PELAKSANAAN PSETK

Pelaksanaan PSETK dilaksanakan berdasarkan Daerah irigasi masing-masing kewenangan;

- Kewenangan Pusat pada luasan DI > 3000 Ha
- Kewenangan Provinsi pada luasan DI antara 1000 – 3000 Ha
- Kewenangan Kabupaten pada luasan DI < 1000 Ha

Keluaran dari pelaksanaan penyusunan PSETK berupa dokumen yang dilegalisasi oleh masing – masing kewenangannya. Untuk kewenangan pusat Dokumen PSETK dilegalisasi oleh Kepala BBWS, untuk kewenangan Provinsi Dokumen PSETK dilegalisasi oleh Kepala Bappeda Provinsi dan untuk kewenangan Kabupaten PSETK dilegalisasi oleh Kepala Bappeda Kabupaten.

TIM PENYUSUN PSETK

DI KEWENANGAN PUSAT

- TIM PENYUSUN :
 - KETUA, BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH DALAM HAL INI DARI UNSUR BBWS
 - ANGGOTA, BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH PU SDA PROV/KAB BAPPEDA PROV/KAB DAN DINAS PERTANIAN PROV/KAB
- FASILITATOR :
 - KOORDINATOR FASILITATOR, BERASAL DARI UNSUR BBWS
 - ANGGOTA, BERASAL DARI DINAS PU YANG MEMBIDANGI IRIGASI/ JURU PENGAIRAN, BAPPEDA DAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN/ PETUGAS PENYULUH PERTANIAN (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A ,DAN POKTAN/GAPOKTAN, TPD DAN TPM.

DI KEWENANGAN PROVINSI

- TIM PENYUSUN :
 - KETUA, BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH DALAM HAL INI DARI UNSUR BAPPEDA PROVINSI
 - ANGGOTA, BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH DINAS PU SDA PROVINSI DAN DINAS PERTANIAN PROVINSI
- FASILITATOR :
 - KOORDINATOR FASILITATOR, BERASAL DARI UNSUR BAPPEDA PROVINSI
 - ANGGOTA, BERASAL DARI DINAS PU YANG MEMBIDANGI IRIGASI/ JURU PENGAIRAN, DINAS PERTANIAN PROVINSI/ PETUGAS PENYULUH PERTANIAN (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A ,DAN POKTAN/GAPOKTAN, TPD DAN TPM

DI KEWENANGAN KABUPATEN

- TIM PENYUSUN :
 - KETUA, BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH DALAM HAL INI DARI UNSUR BAPPEDA KABUPATEN
 - ANGGOTA, BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH DINAS PU SDA KABUPATEN DAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN
- FASILITATOR :
 - KOORDINATOR FASILITATOR, BERASAL DARI UNSUR BAPPEDA KABUPATEN
 - ANGGOTA, BERASAL DARI DINAS PU YANG MEMBIDANGI IRIGASI/ JURU PENGAIRAN, DINAS PERTANIAN KABUPATEN/ PETUGAS PENYULUH PERTANIAN (PPL), KPL, P3A/GP3A/IP3A ,DAN POKTAN/GAPOKTAN, KPL DAN TPM

TAHAPAN PENYUSUNAN PSETK

- Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan

TAHAP PERSIAPAN

- SOSIALISASI PEDOMAN PSETK
- PELATIHAN PSETK
- RAPAT PERTYEMUAN AWAL
- SK TIM PENYUSUN
- RAPAT PERTEMUAN DITINGKAT DI.

TAHAP PELAKSANAAN

- RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN
- PENELUSURAN JARINGAN
- FGD

TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN

- ANALISIS HASIL PSETK DAN VERIFIKASI DATA LAPANGAN
- KONSOLIDASI HASIL PSETK
- PENYUSUNAN LAPORAN PSETK
- FINALISASI LAPORAN PSETK

TAHAP AKHIR

- LEGALISASI PSETK
- PENYAMPAIAN LAPORAN PSETK





TAHAP PERSIAPAN

1. Sosialisasi Pedoman PSETK

dilaksanakan oleh NPIU Bangda, tujuan

- (a)Menyebarkan pengertian PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSIP
- (b)Menyamakan persepsi tentang PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSIP

2. Pelatihan PSETK

Dilaksanakan oleh NPIU Bangda

Tujuan dalam rangka peningkatan kemampuan para peserta pelatihan dalam penyusunan PSETK ujian :

Peserta: BBWS, Bappeda Provinsi/Kabupaten, Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

3. Rapat Pertemuan Awal

Agenda Rapat : Sosialisasi penyusunan PSETK dan Pembentukan TIM penyusun dan fasilitator PSETK

Pada tahap ini pengelola menyiapkan diantaranya:

- Kerangka acuan kerja
- Daftar peserta/undangan
- Daftar Hadir
- Jadwal dan agenda pertemuan
- Materi yang diperlukan untuk kegiatan PSETK

Penyelenggara : BBWS (DI Kewenangan Pusat), Bappeda Prorinsi (DI Kewenangan Provinsi) dan Bappeda Kabupaten (DI Kewenangan Kabupaten)

Peserta: Unsur Pemerintah (Bappeda, Dinas PU SDA dan Dinas Pertanian) dan Unsur Non Pemerintah TPM/KTPM, KPL, P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan. Estimasi peserta masing masing unsur 3 orang



TAHAP PERSIAPAN Lanjutan

4. PENERBITAN SK TIM PENYUSUN

SK Tim Penyusun Dikeluarkan oleh :

- DI Kewenangan Pusat Oleh Kepala BBWS
- DI Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi
- DI Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten

5. RAPAT PERTEMUAN SOSIALISASI DITINGKAT DAERAH IRIGASI

Pelaksana Kegiatan TIM Penyusun PSETK

Lokasi Kegiatan Ditingkat Daerah Irigasi

Pertemuan koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait untuk membahas mekanisme kegiatan PSETK

Peserta Terdiri Dari :

- Perwakilan masyarakat petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya.
- Pengurus kelembagaan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan
- Kelompok Pendamping Lapangan (KPL), meliputi Mantri/Juru Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Aparat Desa dan Kecamatan.
- Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM; dan
- Tokoh masyarakat/adat/agama.



TAHAPAN PELAKSANAAN

1. RAPAT PERSIAPAN

Agenda Pertemuan adalah

- Pemahaman dan cara pengisian form isian PSETK
- Pemahaman teknik pengumpulan data
- Penyusunan Jadwal Pelaksanaan,
- Pembagian TIM (apabila Daerah Irigasinya Luas)
- Analisis kebutuhan Pelaksanaan.

Peserta : TIM Penyusun/fasilitator

2. PENELUSURAN JARINGAN

Penelusuran jaringan irigasi dilakukan untuk mengetahui keadaan nyata jaringan irigasi yang terdapat pada suatu daerah irigasi baik berkaitan dengan kondisi, fungsi maupun permasalahannya serta mengumpulkan data dan informasi sebagai acuan dalam pembahasan program. Penelusuran jaringan melibatkan pengurus P3A/GP3A/IP3A, KPL, TPM dan KTPM, serta memungkinkan untuk pelibatan tokoh masyarakat/adat/agama.

3. FGD

Tujuan FGD untuk memperdalam dan mengidentifikasi masalah-masalah di DI dan sekitarnya, tersusunnya gagasan penanganan masalah, tersusunnya skala prioritas penanganan masalah (seperti perbaikan jaringan irigasi pada area dan lokasi sepanjang jaringan mana yang menjadi Prioritas, revitalisasi pembentukan P3A/GP3A dsb) menurut kelompok dan anggota masyarakat.



TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN

1. ANALISIS HASIL PSETK DAN VERIFIKASI DATA LAPANGAN

Tujuan verifikasi adalah untuk menelaah secara mendalam validitas data lapangan yang dilakukan oleh tim penyusun, apabila dirasa kurang maka dilakukan kembali pengumpulan data yang validitasnya dapat diakui

Pada tahapan ini tim penyusun berkoordinasi dengan tim fasilitator.

2. KONSOLIDASI HASIL PSETK

Setelah dianalisis dan diverifikasi maka dilakukan konsolidasi kan hasil dari masing masing tim untuk disusun menjadi dokumen PSETK

pada tahapan ini dibuatkan berita acara hasil konsolidasi psetk

3. PENYUSUNAN LAPORAN PSETK

Penyusunan laporan merupakan langkah selanjutnya setelah data dan informasi dianalisis dan dikonsolidasi. Laporan dibuat per Daerah Irigasi sebagai bahan tindak lanjut penyusunan rencana kerja pada suatu daerah irigasi

4. FINALISASI LAPORAN PSETK

Setelah draft PSETK dianggap final di tingkat tim penyusun, maka dokumen tersebut perlu dilakukan pembahasan dengan mengundang pihak terkait sesuai dengan DI kewenangannya baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Pada saat pembahasan dokumen sudah dianggap sempurna, maka dokumen tersebut dinggap final dan dapat dilegalisasi sesuai dengan DI kewenangannya, tetapi apabila masih terdapat kekurangan, maka tim penyusun harus memperbaikinya kembali.



TAHAP AKHIR

1. LEGALISASI DOKUMEN PSETK

Dokumen PSETK yang sudah difinalkan, maka dilakukan legalisasi. Legalisasi yang dimaksud adalah dengan ditandatanganinya pada bagian kata pengantar oleh masing-masing DI kewenangannya

2. PENYAMPAIAN LAPORAN PSETK

Sesuai dengan syarat pembuatan laporan diatas yang menyebutkan bahwa laporan harus diterima oleh yang berkompeten/yang berhak menerima.

Laporan harus segera disampaikan kepada semua pihak paling lambat 3 hari sesudah penyusunan laporan selesai dan dalam Kata Pengantar Laporan PSETK telah resmi ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (sesuai kewenangannya) bukan oleh TPM/KTPM atau pihak lainnya.



KEGUNAAN PSETK

01

Kegunaan bagi masyarakat petani (P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan) sebagai dokumen perencanaan pengelolaan irigasi pertanian secara berkelanjutan

02

Kegunaan bagi Komisi Irigasi sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam ; koordinasi perencanaan pengelolaan irigasi-pertanian ; pola dan rencana tata tanam ; rencana tahunan pembagian dan pemberian air ; rekomendasi prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi-pertanian (DPI), dll

03

Kegunaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan irigasi-pertanian sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RP2I

04

Kegunaan bagi pemangku kepentingan lainnya terkait dengan irigasi-pertanian sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam ; Memberikan fasilitasibantuan sesuai kebutuhan kelembagaan petani ; kerjasama berdasarkan kesetaraan dan kemitraan





PELAKSANAAN
VERIFIKASI DLI 7 PSETK



Pengertian Program

IPDMIP,

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project,

Program rehabilitasi dan peningkatan kinerja sistem irigasi, secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi.

IPDMIP,

Result Based Lending (RBL) atau pinjaman yang berbasis hasil atau output. Artinya ADB akan menyerahkan pinjaman secara bertahap sesuai dengan pencapaian hasil pelaksanaan program oleh Pemerintah, Dalam Mendukung pinjaman yang berbasis hasil, maka diperlukan Indikator yang dapat mengukur hasil yaitu melalui *DLI (Disbursement Linked Indicator)*

Prinsip RBL

Sistem pencairan pinjaman RBL, berdasarkan capaian hasil bukan berdasarkan belanja

RBL mendukung program sektor pemerintah yang telah dituangkan di dalam dokumen perencanaan pemerintah

RBL membiayai Kerangka Anggaran Program atau RPJMN

RBL, mendukung penggunaan dan peningkatan sistem yang berlaku di Indonesia



DEFINISI VERIFIKASI

Disbursement Linked Indicators (DLI)

Pengertian Disbursement Linked Indicators (DLI) merupakan indikator yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB merupakan target atau sasaran keluaran (output) tahunan yang harus dicapai sebagai dasar pembayaran pinjaman oleh ADB. Besarnya pembayaran pinjaman tahunan disepakati bersama pada saat perundingan pinjaman. Terdapat 7 (tujuh) DLI dari 8 (delapan) DLI yang akan diverifikasi oleh BPKP

verifikasi/ve·ri·fi·ka·si/ /vérifikasi/ n pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya: pihak kepolisian telah mengadakan -- terhadap pernyataan salah seorang anggota partai tentang adanya keterlibatan purnawirawan TNI dalam kasus pemalsuan uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan)



DLI 7

VERIFIKASI - Disbursement Linked Indicators (DLI 7)

Yang diverifikasi hanya hasil atau output fisik DLI (berupa dokumen PSETK) kegiatan penyusunan dokumen profil sosial ekonomi teknik dan kelembagaan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dan Dinas provinsi/kabupaten dan yang dibiayai PHLN, Rp Murni APBN dan atau APBD

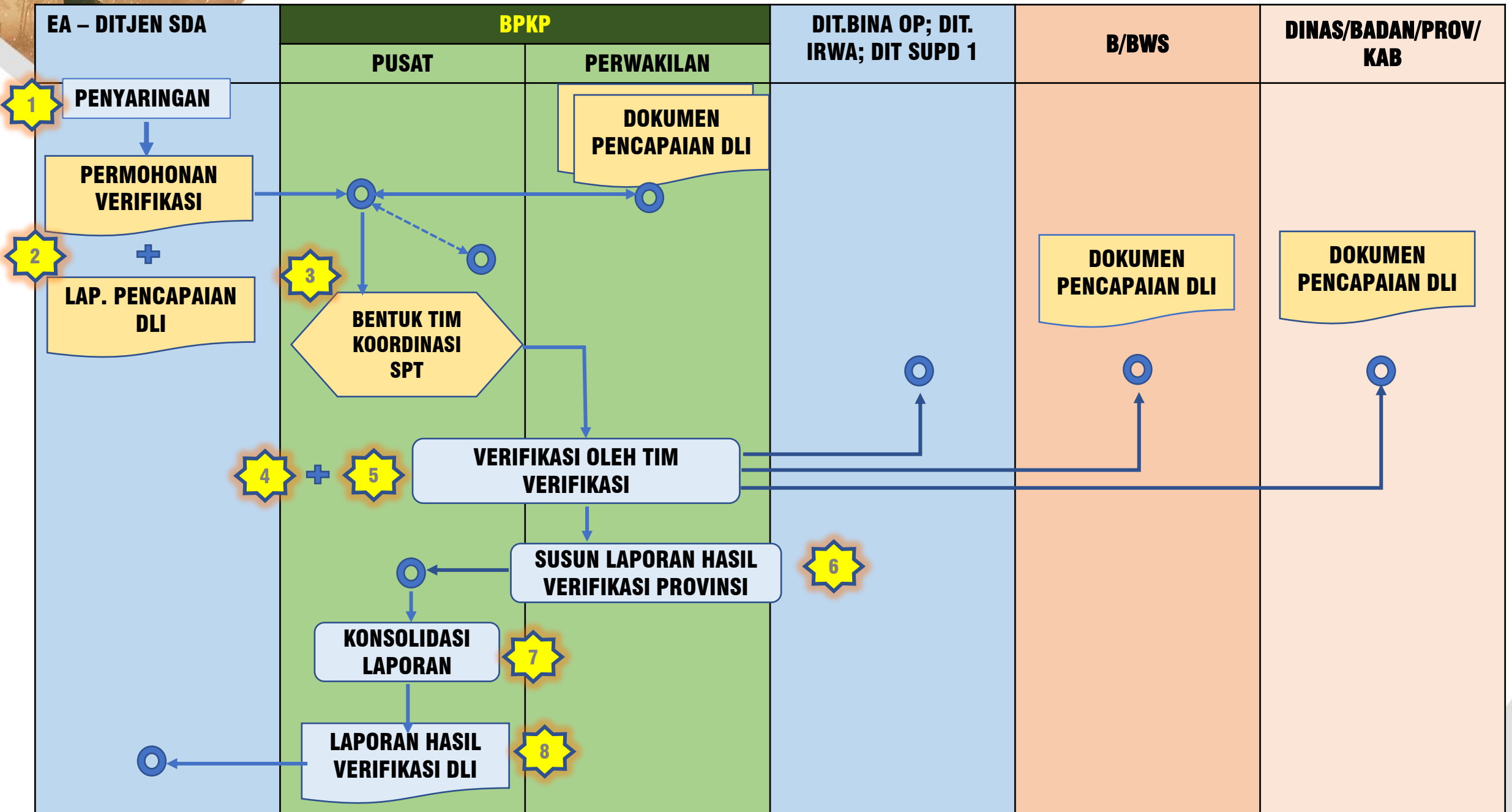


Proses dan tahapan verifikasi DLI

Proses verifikasi secara garis besar akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1. NPIU Bangda melakukan penyaringan pencapaian program guna mendapatkan daftar pencapaian DLI 7 yang perlu diverifikasi oleh BPKP serta mempersiapkan surat permohonan verifikasi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku Executing Agency (EA) menyampaikan surat permohonan kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat (BPKP) agar melakukan verifikasi DLI kegiatan Program IPDMIP. Permintaan verifikasi dilengkapi dengan Laporan Pencapaian Program yang disusun oleh NPMU IPDMIP berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pemantauan rutin oleh NPIU Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1.
2. BPKP Pusat mempersiapkan pelaksanaan verifikasi dengan mempelajari kelengkapan data/informasi yang tersedia dalam dokumen permintaan verifikasi yang diterima dari EA. Jika diperlukan, BPKP dapat meminta tambahan data atau keterangan, dan atau juga mengklarifikasi langsung ke NPIU terkait. BPKP Pusat lalu menerbitkan keputusan penetapan Tim Verifikasi BPKP Pusat dan Tim Verifikasi BPKP Perwakilan di 16 provinsi IPDMIP. Selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Verifikasi.
3. BPKP Pusat melakukan pendataan berdasarkan dokumen dan data yang disediakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina O&P serta Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 sesuai dengan DLI terkait.
4. Tim BPKP melakukan sampling untuk menentukan lokasi dan jumlah output yang akan diverifikasi.

ALUR PROSES VERIFIKASI





Target Sasaran DLI 7

ESTIMASI KERUSAKAN	TOTAL DAERAH IRIGASI	KEWENANGAN			TOTAL AREA	JUMLAH PROV/KAB
		PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN		
> 40 %	719	143,872 Ha	55,887 Ha	126,793Ha	326,522 Ha	16/74
		45 DI	93 DI	581 DI		

Pelaksanaan PSETK pada Program IPDMIP masuk kedalam target DLI 7. Target tersebut sebanyak 719 Daerah irigasi yang terintervensi, yang tersebar di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten peserta program



TARGET CAPAIAN DLI 7 PSETK

No	Indikator	Baseline	2017	s/d 2018	s/d 2019	s/d 2020	s/d 2021
2: Perbaikan Pengelolaan, Operasi & Pemeliharaan Irigasi							
DLI 7	Terbitnya Dokumen PSETK pada 719 Daerah Irigasi	-	-	Setidaknya 500 dokumen PSETK Terbit	719 dokumen PSETK Terbit	-	-



INDIKATOR VERIFIKASI

Dalam proses Verifikasi DLI 7 terdapat indikator verifikasi adalah sebagai berikut

PEMBENTUKAN

Dalam proses penyusunan PSETK terdapat TIM PENYUSUN dalam bentuk SK Tim ditetapkan Kepala Bappeda

PELAPORAN

Pelaporan Berupa Dokumen PSETK berdasarkan kewenangan yang sudah diatur dalam panduan PSETK, isi dokumen psetk setidaknya berisi :

- Profil kemampuan sosial ekonomi
- Profil kondisi teknis keirigasian
- Profil Kondisi teknis Pertanian
- Profil kondisi kelembagaan
- Profil Kondisi lingkungan

PARTISIPATIF

Pendekatan dalam penyusunan PSETK adalah pendekatan partisipatif mulai dari peninjauan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Yang dilihat dalam penyusunan PSETK keterlibatan:

- Peran Serta masyarakat petanidalam penyusunan PSETK
- Peran serta perempuan dalam penyusunan PSETK



VERIFIKASI (DLI 7) PENYUSUNAN PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIK KELEMBAGAAN (PSETK)

PEMBENTUKAN NILAI MAX 10
PELAPORAN NILAI MAX 25
PARTISIPATIF NILAI MAX 10
TOTAL NILAI MAX 45

VERIFIKASI DOKUMEN PSETK

DLI 7

Formulir Verifikasi: V-7

Tanggal Verifikasi :

Daerah Irigasi :

Kabupaten :

Provinsi :

Kewenangan:

Pusat - Provinsi - Kabupaten

.....> Lingkari yang sesuai

Nilai Dokumen PSETK (Nilai dokumen PSETK yang disampaikan untuk diverifikasi)... (a)



PEMBENTUKAN

No	Indikator	Nilai Bagian Dokumen PSETK *)	Verifikasi		Petunjuk	Keterangan	
			Kondisi	Nilai			
1	2	3	4		5	6	7
I	<u>PEMBENTUKAN</u>		10,00				
	SK Tim ditetapkan Kepala Bappeda		Tidak ada	Ada	o Lihat surat keputusan atau penetapan Tim	Daerah Irigasi Kewenangan Prov/Kab, SK oleh Kepala Bappeda Prov/Kab	
			0,00	10,00		Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Dikeluarkan oleh Kepala BBWS/BWS	

PELAPORAN

II <u>PELAPORAN</u> Isi laporan PSETK:	25,00					
a. Profil kemampuan sosial ekonomi	Tidak ada		Ada		Baca dan cek Laporan apakah isi sudah o menjelaskan kemampuan sosial ekonomi masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil kemampuan sosial ekonomi terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar daerah irigasi
	0,00		5,00			
b. Profil kondisi teknis keirigasian	Tidak ada		Ada		Baca dan cek Laporan apakah isi sudah o menjelaskan kemampuan teknis keirigasian masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil Kondisi Teknis, terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi fisik jaringan irigasi dilihat dari skema jaringan dan tingkat kerusakan pada setiap jaringan irigasi
	0,00		5,00			
c. Profil Kondisi teknis Pertanian	Tidak ada		Ada		Baca dan cek Laporan apakah isi sudah o menjelaskan kemampuan teknis pertanian masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	
	0,00		5,00			
d. Profil kondisi kelembagaan	Tidak ada		Ada		Baca dan cek Laporan apakah isi sudah o menjelaskan kemampuan kelembagaan masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	Profil Kondisi Kelembagaan, terdapat dalam Bab 2 tentang gambaran Umum dan Bab 3 Hasil Analisa PSETK, berisi kondisi organisasi pengelola irigasi/pertanian apakah roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, atau sama sekali tidak terdapat organisasi pengelola irigasi pada jaringan irigasi tersebut sehingga diperlukan untuk dibentuk dan diberdayakan
	0,00		5,00			
e. Profil Kondisi lingkungan	Tidak ada		Ada		Baca dan cek Laporan apakah isi sudah o menjelaskan kondisi lingkungan masyarakat tani Daerah Irigasi tersebut	
	0,00		5,00			



PARTISIPATIF

III.	<u>PARTISIPATIF</u>	10,00					
	1. Peran Serta Masyarakat petani dalam penyusunan PSETK	Tidak Ada		Ya		Lihat Berita Acara Penelusuran Jaringan, o dokumen atau data lainnya (misalnya photo dokumentasi)	
		0,00		5,00			
	2. Peran serta perempuan dalam penyusunan PSETK	Tidak ada	1-15%	>15%		Baca dan cek Laporan atau photo o dokumentasi atau dokumen lain untuk konfirmasi	
		0,00	3,00	5,00			
						Peran serta perempuan: partisipasi dalam penyusunan Dokumen PSETK, baik sebagai tim penyusun, maupun partisipasi dalam rapat, penelusuran jaringan dan lainnya. Peran serta perempuan bisa dari unsur pemerintah, TPM/KTPM atau unsur non-pemerintah (P3A/GP3A/IP3A dan atau Kelompok Tani/Gapoktan)	



PERHITUNGAN

Cara menghitung nilai hasil verifikasi:

- Nilai verifikasi PSETK > 31,00 maka Dokumen PSETK (a) terverifikasi sesuai.
- Bila nilai verifikasi dokumen PSETK < atau = 31,00 maka nilai PSETK terverifikasi = Nilai PSETK (a) - Nilai Bagian PSETK (b) + Nilai verifikasi (c)

Contoh perhitungan: Misalnya nilai dokumen PSETK (a) = 74,00 dan Nilai Bagian dokumen PSETK (b) = 35,00, maka

1. Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 29,00 (< 31,00), maka nilai Dokumen PSETK terverifikasi = 74,00 - 35,00 + 29,00 = 68,00.
2. Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 32,00 (> 31,00), maka nilai Dokumen PSETK terverifikasi tetap = 74,00

Kesimpulan:

1. Nilai verifikasi Dokumen PSETK Daerah Irigasi..... :
(.....)
2. Dokumen PSETK: Kurang/Cukup/Baik **)

Verifikator - Tim BPKP

Kategori Nilai

Kurang	Cukup	Baik
< 50	51-70	71-100

.....
NIP

*) Diisi sesuai dengan nilai nilai Dokumen PSETK yang disampaikan untuk diverifikasi

**) Coret yang tidak sesuai

.....
NIP

SIMULASI PSETK





PENGANTAR STUDI KASUS

Pembelajaran Studi Kasus (Problem Base Learning) adalah metode belajar yang mendekatkan materi pembelajaran pada kehidupan yang sebenarnya.

Dalam kehidupan yang nyata setiap insan menghendaki bagaimana setiap saat kita dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan tersebut bisa sederhana tetapi sering juga sangat kompleks.

Masalah kompleks menjadi sederhana karena cara mengatasinya pernah dialami, sebaliknya yang sederhana bagi sebagian orang menjadi kompleks karena belum pernah mengalaminya.



SIMULASI VERIFIKASI DLI 8

Agar verifikator paham terkait dengan Form isian, maka perlu dilakukan simulasi

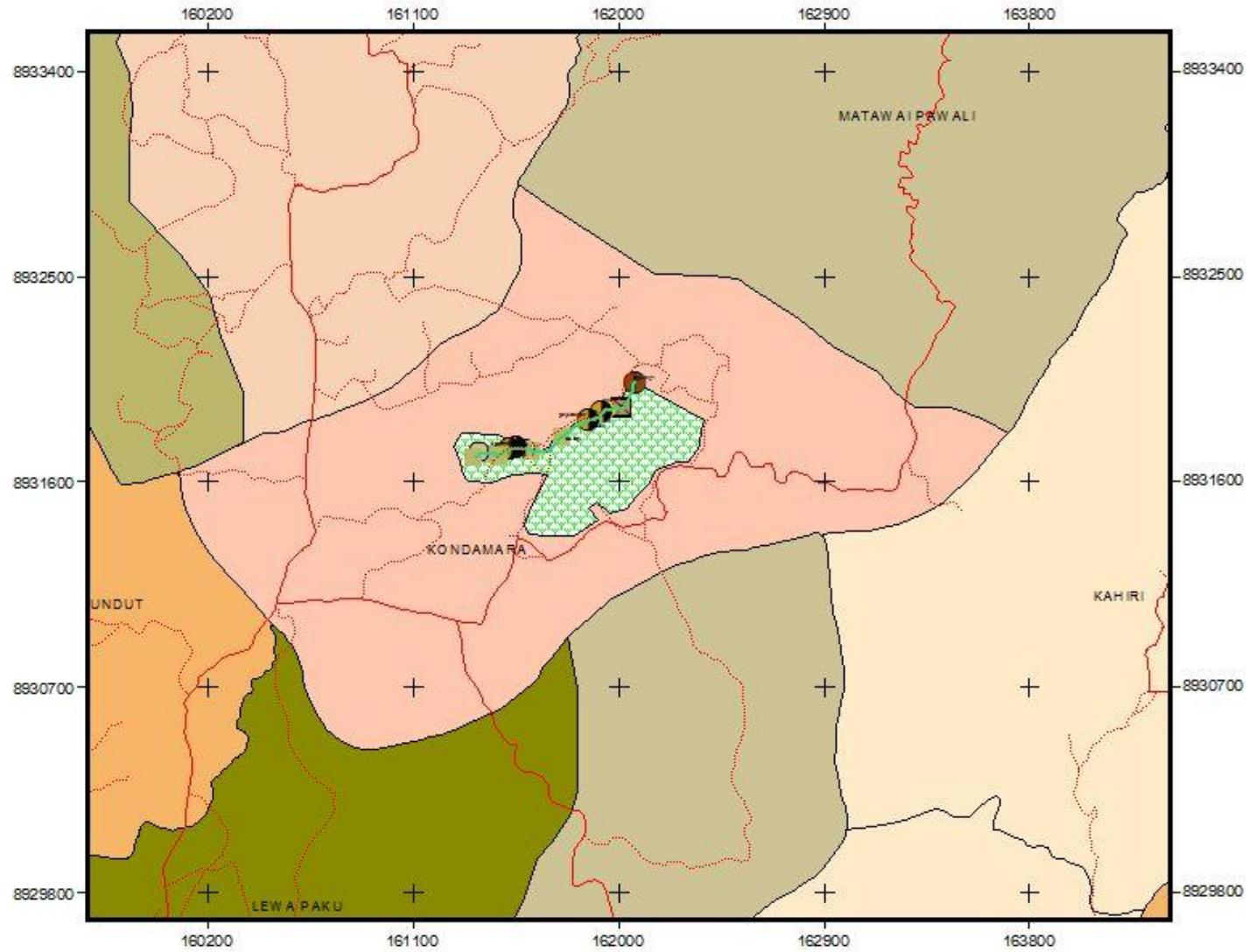
pengisian form verifikasi terhadap dokumen yang telah disediakan

Dokumen Simulasi PSETK adalah Dokumen PSETK DI KONDAMARA, Kabupaten Sumba Timur tahun 2015

KERTAS KERJA KELOMPOK DENGAN PEMBELAJARAN STUDI KASUS



Peta DI KONDAMARA



Jalan Lingkungan
Jalan kabupaten

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



A stag with large, dark antlers stands in a misty, golden-hued forest. The scene is filled with falling snow, creating a soft, ethereal atmosphere. The stag is positioned in the lower center of the frame, looking upwards and to the left. The background is a dense forest of trees, with light filtering through the branches, creating a warm, golden glow. The overall composition is framed by a large, diagonal white shape that cuts across the image from the top left to the bottom right.

Thank you